



## **Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang**

**Ediyanto**

Universitas Pasundan

Email: [EDIYANTOSANTOSO903@GMAIL.COM](mailto:EDIYANTOSANTOSO903@GMAIL.COM)

**Mona indrianie**

Universitas Pasundan

Email: [monaindrianie@unpas.ac.id](mailto:monaindrianie@unpas.ac.id)

Alamat: Jl. Tamansari No.6-8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116

Korespondensi penulis : [EDIYANTOSANTOSO903@GMAIL.COM](mailto:EDIYANTOSANTOSO903@GMAIL.COM)

**Abstract.** *This research examines the Implementation of the Village Heritage Management System (SIPADES) in Realizing Good Goernance in the Village Government of Sumedang Regency. This case is interesting to study, because at this time the village has room to carry out governance. The procedure used is descriptive qualitative. There are also sources of information consisting of primary information with a total of 5 informants and secondary information with 3 various documents. The method of collecting information is tried with literature research, field research, (observation, interviews, and documents). Methods of information analysis are tried by reducing information, presenting information, as well as drawing conclusions. The results of the research are the implementation of village heritage management policies in the Tanjungsari Village Government still facing some obstacles. Among other things, in the communication aspect, there is still a lack of training and assistance in the SIPADES application. Non-human energy sources still lack.*

**Keywords:** *Policy, Sipades, Good Governnance.*

**Abstrak.** *Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Peninggalan Desa( SIPADES) dalam Mewujudkan Good Goernance di Pemerintah Desa Kabupaten Sumedang. Kasus ini jadi menarik buat, diteliti sebab pada dikala ini desa mempunyai ruang buat melaksanakan tata kelola pemerintahan. Tata cara yang digunakan merupakan kualitatif deskriptif. Ada pula sumber informasi terdiri dari informasi primer dengan jumlah 5 orang informan serta informasi sekunder dengan 3 berbagai dokumen. Metode pengumpulan informasi dicoba dengan riset kepustakaan, riset lapangan( observasi, wawancara, serta dokumen). Metode analisis informasi dicoba dengan reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil riset merupakan Impelementasi kebijakan pengelolaan peninggalan desa di Pemerintah Desa Tanjungsari masih hadapi sebagian hambatan. Antara lain pada aspek komunikasi masih kurangnya pelatihan serta pendampingan aplikasi SIPADES. Sumber energi non manusia masih kekurangan dalam*

---

Received Januari 30, 2022; Revised Febuari 2, 2022; Maret 22, 2022

\*Corresponding author, e-mail address

## *Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang*

*jaringan internet. Pada aspek disposisi, kebijakan pengelolaan peninggalan desa bertabiat top-down dimana. Tidak hanya itu pada aspek birokrasi penerapan pengelolaan peninggalan desa di Pemerintah Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang masih hadapi hambatan berbentuk proses penginputan peninggalan. Penginputan memerlukan waktu yang lumayan lama. Upaya yang bisa dicoba dengan mengadakan pendampingan yang intens terhadap seluruh pemerintah desa di Kabupaten Sumedang dalam pengoprasian aplikasi SIPADES. Pendampingan wajib bertabiat secara berkepanjangan hingga pemerintah desa bisa memanfaatkan aplikasi SIPADES dalam membantu mewujudkan Good Governance.*

**Kata kunci:** *Kebijakan, Sipades, Good Governance*

### **LATAR BELAKANG**

Masa reformasi sudah bawa banyak yang sanggup mendesak good governance pergantian ikatan system pemerintahan yang sanggup mendekati negeri dengan baik ditingkat pusat ataupun ditingkat desa. Diisyarati dengan terdapatnya otonomi desa. Otonomi ini diharapkan sanggup mendesak akuntabilitas serta responsive serta mewujudkan tata pemerintahan yang Parlemne desa( BPD) ialah tubuh baik( good governance) (Bahrudin, 2015). Good governance pada pencapaiannya harus didukung si public service jadi orientasi pada penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik selaku bagian krusial pada pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Apalagi, pelayanan publik memerlukan pelayanan yang sama, tidak mempunyai penilaian yang negatif terhadap pelayanan yang diberikan (Jamal et al., 2020).

Mewujudkan itu semua penggunaan sistem informasi menjadi salah satu bentuk solusi yang efektif dan efisien untuk mempersingkat operasional kerja khususnya pada pendataan aset daerah atau negara (Q. & Raharso, 2020). Saat ini pada era pemanfaatan digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya harus diperkuat dalam semua bidang (Nugraha & Lestari, 2022). Kenyataannya masih banyak hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hambatan yang ada mulai dari tahap pelaksanaan masih lemah dari segi pengawasan. Kedua, sarana belum memadai untuk implementasi sistem informasi manajemen dalam bidang tata kelola pemerintah atau yang kita kenal dengan istilah *E- Government*. Ketiga, pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Keempat penerapan *E- Government* dalam mewujudkan *Smart Governance* sudah berjalan, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan (Nugraha, 2020).

Sistem informasi memainkan peran penting dalam kinerja sebuah organisasi secara keseluruhan. Mereka memberikan banyak keuntungan kepada pengguna dari proses transaksi yang sederhana sampai tingkat operasional untuk tugas-tugas sulit, seperti membuat keputusan penting dan kompetitif di tingkat strategis organisasi (Khristianto et al., 2015). Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi (Sidharta, 2018). Pemerintah sudah membuat Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat akan otonomi desa, yang sebelumnya telah dimiliki desa. Pengelolaan aset desa ini landasan yang harus dijalankan adalah pengelolaan aset yang didasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini ditetapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, upaya mendukung pengelolaan aset desa yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah Desa sebaiknya mengembangkan sistem informasi manajemen yang handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset desa (Natasya, 2020).

Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan arsip, sumber daya manusia yang masih kurang pengetahuan dalam teknologi, pegawai masih belum sadar akan pentingnya teknologi dalam tata kelola pemerintah (Fauziyah, 2019). Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap proses pelayanan melalui *E-Government*, minimnya sosialisasi pelayanan melalui *E-Government* menjadi beberapa penyebab kenapa masih rendahnya penggunaan teknologi dalam administrasi negara (Zahri & Ip, 2022). Kemajuan teknologi informasi desa yang berada di Kabupaten Sumedang akan dipandang baik jika bisa terpenuhi berbagai aspek. (Mafturrahman, 2022).

Fenomena pengelolaan Aset Desa“ SIPADES” di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang ialah: Minimnya pengarahan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Warga serta Desa terpaut panduan pemakaian aplikasi Sistem Pengelolaan Peninggalan Desa, belum terdapat penekanan spesial buat pemakaian aplikasi Sistem Pengelolaan Peninggalan Desa, tidak terdapatnya update aplikasi Sistem Pengelolaan Peninggalan Desa tiap tahunnya. Tidak hanya itu minimnya anggaran sebab tidak memiliki pemasukaan asli desa serta dana turun tidak pas waktu, minimnya pembinaan serta kenaikan kompetensi dari dinas terpaut, aplikasi SIPADES belum berjalan dengan maksimal.Terdapat banyak riset yang mangulas tentang pelaksanaan suatu sistem buat tata kelola pemerintahan. Pada konteks E- Government dalam upaya mewujudkan Good Governance fokus pada tatakelola di lembaga semacam dinas. Tidak hanya itu permasalahan yang diteliti masih banyak berfokus pada mutu pelayanan, kulaitas serta kinerja aparatur, masih sedikit menimpa pengelolaan dalam suatu lembaga pemerintah. Dari hasil literut review membuktikan kalau lokus riset lebih banyak pada tinggkat kota ataupun kabupaten, pada tingkatan desa masih sedikit. Sebaliknya desa ialah pemerintahan ringkat yang sangat kecil yang hendak menunjang tata kelola pemerintahan pada tingkatan yang lebih besar.

Mengisi kekosongan( gab) studi yang terdapat serta penringnya riset semacam ini butuh dicoba sebab bisa membagikan data tentang seberapa besar daya guna pemakaian aplikasi SIPADES dalam pengelolaan peninggalan desa di pemerintah desa. Tidak hanya itu, penemuan yang diperoleh bisa jadi bawah riset pengelolaan peninggalan desa. Hasilnya pula bisa digunakan atas bawah pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan peninggalan desa. Oleh sebab itu tujuan riset ini adalah buat mengenali seberapa sepanjang mana pemakaian aplikasi SIPADES dalam pengelolaan peninggalan desa di Pemerintah Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

## **KAJIAN TEORITI**

Pengelolaan Aset Desa( SIPADES) ialah sistem data berbentuk aplikasi yang digunakan buat pencatatan administrasi peninggalan senantiasa desa mulai dari merancang, mengadakan, penata usahaan sampai penyampaian laporan lengkap dengan kodefikasi serta

# *Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang*

labelisasi peninggalan senantiasa bersumber pada ketentuan yang sudah diresmikan pemerintah. Tujuannya ialah buat menertibkan kepemilikan peninggalan dalam upaya meminimalkan efek kehabisan peninggalan desa serta membagikan kemudahan kepala desa dalam menyajikan laporan peninggalan senantiasa yang dipunyai kantor desa, dan selaku sistem data yang menolong fitur desa dalam melaksanakan tata kelola peninggalan senantiasa. Aplikasi Sipades 2. 0 merupakan pemberuan dari aplikasi Sipades 1. 0 yang seluruh berbasis desktop jadi berbasis web( online). Menu didalamnya tidak beda jauh dengan tipe pertamanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Menggunakan metode *Deskriptif* berkenaan dengan permasalahan aplikasi Sipades dalam Pengelolaan Aset Desa. Menurut Sugiyono (2019:18), mengemukakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci”.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2022 di Kantor Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Adapun sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah 5 orang informan dan data sekunder dengan 3 macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumen). Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sajian data. Sub proses ini merupakan suatu bentuk “penyajian” yang diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan atau diversifikasi. Dalam sub proses ini, peneliti mulaimelakukan tindakan interpretasi yaitu memberikan makna pada data atau informasi yang telah disajikan (Nugroho, 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Kedungwuni dan juga Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penerapan pengelolaan aset desa dengan menggunakan aplikasi desa. Namun pelatihan mengenai penggunaan aplikasi SIPADES masih kurang. Sosialisasi terhadap aplikasi SIPADES juga masih minim. Padahal dalam penggunaannya SIPADES memerlukan bimbingan dan pendampingan. Menu yang sangat banyak dalam penginputan aset desa memerlukan waktu yang cukup lama bagi perangkat desa untuk dapat mengoperasikan aplikasi SIPADES. Dimulai dari menginputan profil desa, data aset desa sampai pada pelebelan aset desa. Dimensi komunikasi perangkat desa mendapatkan sosialisai dan pendampingan yang baik maka akan dapat memaksimalkan aplikasi SIPADES. Hal akan sangat membantu dalam pengelolaan aset desa. Aplikasi desa apabila dijalankan secara baik akan sangat membantu dalam mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Desa, khususnya dalam urusan pengelolaan aset desa.

Sumber daya yang penting dalam penerapan meliputi; staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan

tatakelola pemerintahan yang baik. Aspek sumber daya terdapat dua yaitu; sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang masih mengalami hambatan dalam kompetensi aparatur perangkat desa. Perangkat desa masih belum mahir dalam penggunaan aplikasi SIPADES. Sistem aplikasi yang sangat detail, perangkat desa diperlukan waktu yang lama untuk dapat mengoperasikan aplikasi SIPADES dengan baik. Seharusnya ada bimtek berkelanjutan untuk penggunaan aplikasi SIPADES. Agar penerapan pengelolaan aset dengan dengan aplikasi SIPADES dapat berjalan maksimal. Sedangkan dalam aspek sumber daya nonmanusia Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang masih kekurangan dalam jaringan internet, karena di kantor Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang belum terdapat wifi. Seharusnya setiap kantor pemerintah desa sudah terdapat wifi. Jika aspek sumber daya sudah dapat menunjang penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) bisa berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan *Good Governance*.

Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang, kebijakan pengelolaan aset desa bersifat *top-down*. Hal ini kemudian memunculkan konsekuensi terhadap tantangan pada penerapan tersebut, dimana kurang aplikatif dan komplis dalam penatausahaan aset desa. Adapun, sikap Pemerintah Desa Tanjungsari adalah tetap melaksanakan proses penatausahaan aset desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yang sudah menjadi suatu kebijakan sebagai bentuk tertib administrasi. Dengan demikian, masih terdapat kendala pada penerapan pengelolaan aset desa melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam penerapan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari "*virus weberian*" yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Penanganan penerapan pada sistem SIPADES di Desa Langkap sudah baik, dengan di dibagi menjadi 2 tim yaitu tim pengelolaan dan tim inventarisasi. Sehingga proses pengelolaan aset desa bisa berjalan dengan efektif. Sejauh ini Desa Langkap sudah dapat memaksimalkan SIPADES, sangat membantu dalam tatakelola desa dalam bidang aset desa. Penerapan pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang masih mengalami kendala berupa proses penginputan aset. Penginputan memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu banyak aset yang harus diinput pada aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Namun demikian Pemerintah Desa Tanjungsari sudah berupaya melakukan proses pengolahan data dan penginputan dalam waktu 30 hari. Hal ini terjadi karena banyak aset desa yang belum terdata secara manual, selain itu masih banyak bukti aset desa yang belum ada. Dengan demikian, kapasitas birokrasi Pemerintah Desa Tanjungsari cukup memadai dalam tata kelola pengelolaan aset desa sehingga penerapan pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan baik dan juga memberikan manfaat bagi pemerintah desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## *Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang*

Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Tanjungsari masih banyak desa yang mengalami beberapa kendala. Diantaranya masih kurangnya pada aspek komunikasi pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPADES dalam pengelolaan aset desa. Sedangkan dalam penggunaannya SIPADES memerlukan bimbingan dan pendampingan karena menu yang sangat banyak dalam penginputan aset desa. Aspek sumberdaya manusia, perangkat desa masih belum mahir dalam penggunaan aplikasi SIPADES. Sumber daya non manusia masih kekurangan dalam jaringan internet, karena di kantor Desa Tanjungsari belum terdapat wifi. Pada aspek disposisi, kebijakan pengelolaan aset desa bersifat *top-down* dimana. Hal ini kemudian memunculkan konsekuensi terhadap tantangan pada implementasi kebijakan tersebut, dimana kurang aplikatif dan komplit dalam penatausahaan aset desa. Selain itu pada aspek birokrasi implementasi kebijakan pengelolaan aset desa di Pemerintah Desa Tanjungsari masih mengalami kendala berupa proses penginputan aset. Penginputan memerlukan waktu yang cukup lama. Agar implementasi kebijakan Aplikasi Sipades Pengelolaan Aset Desa dapat membantu mewujudkan *Good Governance*, maka pemerintah harus dapat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIPADES. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengadakan pendampingan yang intens terhadap semua pemerintah desa di Kabupaten Sumedang dalam pengoperasian aplikasi SIPADES. Pendampingan harus bersifat secara berkelanjutan sampai pemerintah desa dapat memanfaatkan aplikasi SIPADES dalam membantu mewujudkan *Good Governance*.

### **DAFTAR REFERENSI:**

- Bahrudin, A. (2015). *Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance Pendahuluan Good Governance Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemerintahan Desa*.
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.298>
- Khristianto, W., Supriyanto, T., & Wahyuni, S. (2015). Buku Ajar Sistem Informasi Manajemen. In *STMIK Ichsan*.
- Mafturrahman, Aria Elshifa, Budi Nugraha, A. J. (2022). *KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)*. 2(2).
- Natasya, S. N. (2020). *PENGLOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS*. 1449–1461.
- Nugraha, B. (2020). *Implementation of E-Government Policy in Making Smart Governance at Government Communication and Informatics Implementasi Kebijakan E-Government dalam Mewujudkan Smart Governance pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung*. 2, 13.
- Nugraha, B., & Lestari, R. P. (2022). *Keadaan Big Data Dapat Menjadi Peluang*. 5(1), 10–17. <http://jurnal.iuqibogor.ac.id>

Nugroho, H. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 119–124. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1150>

Q., M. R., & Raharso, M. (2020). Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 4(1), 33–42. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v4i1.6831>

Sidharta, L. (2018). Sistem Informasi Manajemen. *Sistem Informasi Manajemen*, 1–387.

Zahri, F., & Ip, M. (2022). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 7, Nomor 1, Feb 2022* [www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP](http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP). 7, 1–20.